



**Judul** : Kinerja DPR : Moratorium Harus Segera Dilakukan  
**Tanggal** : Selasa, 18 September 2012  
**Surat Kabar** : Suara Karya  
**Halaman** : 3

## KINERJA DPR

# Moratorium Harus Segera Dilakukan

JAKARTA (Suara Karya): Meski DPR bersikeras untuk tidak melakukan moratorium kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri, masyarakat tetap menuntut adanya perbaikan atas kinerja DPR termasuk untuk tidak lagi plesiran ke luar negeri untuk hal-hal yang tidak substansi menyangkut kepentingan rakyat.

"Menurut saya alasan untuk kunjungan kerja ke luar negeri sangat mengada-ada. Apalagi hanya studi soal bendera. Ya jelas masyarakat mengkritik kelakuan anggota DPR ini. Kecuali kalau kunjungan yang dilakukan misalnya pertemuan anggota DPR sedunia dan semacamnya, ini mungkin rakyat tidak akan mempersoalkan," kata Pengamat politik dari LIMA (Lingkar Madani) Indonesia, Ray Rangkuti kepada *Suara Karya* tadi malam di Jakarta.

Ia menilai, kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri sebagai sebuah pemborosan anggaran negara. Apalagi kata Ray, studi banding yang dilakukan oleh anggota DPR hanya terkait soal bendera.

Ditegaskannya bahwa kunjungan anggota DPR ke luar negeri hanya untuk poya-poya dan pelesiran belaka. Karena itu, Ray setuju dengan usulan moratorium kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri. Moratorium adalah langkah terbaik. Dan saya kira anggota DPR juga harus memiliki tenggang rasa kepada rakyat," ujar Ray Rangkuti.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Marzuki Alie mengatakan, kunjungan kerja dalam rangka menyelesaikan pembahasan Undang-undang tidak dapat dimoratorium, termasuk kun-

jungan ke luar negeri. Ia menjelaskan, pembahasan UU sangat berkaitan dengan kebijakan publik sehingga harus mendapatkan referensi yang seluas-luasnya. Referensi publik tersebut sangat dibutuhkan agar UU yang dibahas tidak mengandung masalah dan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Pihaknya tidak berkeinginan UU yang dibahas DPR tersebut harus direvisi lagi setelah disahkan disebabkan kurang referensi dari publik.

"UU itu berlaku untuk jangka panjang dan mengikat. Kalau salah, bisa bahaya," katanya.

Karena itu, kata Marzuki, semua pihak harus memahami proses tersebut dan tidak menghalangi DPR untuk memperbanyak referensi dalam penyelesaian UU, termasuk dengan kunker ke

luar negeri.

Selain itu, DPR telah banyak mengurangi kunker ke luar negeri dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan hanya melakukannya untuk penyelesaian UU saja. "Diluar itu tidak ada. Kalau pulang sudah pasti ada UU," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Karena itu tidak mengherankan jika jumlah anggaran negara yang digunakan DPR untuk kunker ke luar negeri jauh lebih kecil dibandingkan lembaga lainnya.

"(Biaya kunjungan) DPR hanya sekitar Rp 100 miliar, pemerintah dan lembaga lain sampai Rp 24 triliun lho," katanya.

Marzuki menambahkan, banyak pihak yang salah mengerti tentang manfaat kunker ke luar negeri yang dilakukan DPR jika belum mengkaji materi UU yang dihasilkan. (Kartoyo DS)